

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Abrurrahman, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1993.
- Parlindungan, A.P., *Komentar Atas UUPA*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Parlindungan, A.P., *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 1997.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak – Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Santoso, Urip, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, Surabaya, 2013.
- Soediono M.P. Tjondronegoro, Soediono M. P., dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, PT. Gramedia, Jakarta, 1984.
- Soegiharto, *Penggunaan Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Umum*, 1996.
- Sutedi, Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573).

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643).

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Website :

Badan Pertanahan Nasional, *Sengketa dan Konflik Pertanahan* <http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan>, diakses pada hari Minggu 21 Desember 2014, pukul 09.14 WIB.